

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM MENANGANI KONFLIK HORIZONTAL DI DESA
BALINURAGA KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

(Studi Badan KESBANGPOL Lampung Selatan)

Eko Santoso

Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Indonesia is a country made up of many islands, tribes and different traditions so that the key to maintaining the unity of the Republic of Indonesia is the difference by bringing together into a single view and purpose without any friction or conflict. The Government, either the Central Government or the regions obliged to prevent and resolve conflicts that exist amongst the people. Government's role is indispensable in the handling of the conflict. Local governments have a very large role in preventing conflicts that exist because the local government closer to the public in the sense that the accessibility of local Government much faster than the Central Government

This research was conducted in the offices of the Nation's Unity, Political and the Protection of the Public Agency or Badan Kesbangpol and in the village of Balinuraga. The research method used is descriptive qualitative methods. The results of research on the role of South Lampung Regency Government there are three namely prevention of pre-conflict, peace process and post-war handling of conflicts. In the pre-conflict prevention, Badan Kesbangpol coordinate and cooperate in preventing conflict. Cooperation is done among them along with the Indonesia national armed forces and Police of the Republic of Indonesia Also. In the prevention of South Lampung District Government failed to suppress the friction that occurs due to the number of officers who guard is not worth the amount of mass. In the process of peace the role of Badan Kesbangpolinmas together with the Police Department to become mediators in the negotiation process which was later assisted by the provincial government Lampung and Central Government. The post-conflict handler, the Kesbangpol coordinate with related agencies in South Lampung Regency Government coordinating aid and also conduct dissemination, extension of the agreed peace treaties and also do outreach national insights.

Keywords: *The Role of Government, Social Conflict, Horizontal Conflict*

A. Pendahuluan

Konflik di Indonesia sangat beragam mulai dari konflik etnis, suku, agama maupun konflik sosial budaya. Konflik tersebut merupakan konsekuensi dari keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri tercatat telah terjadi banyak sekali konflik, baik yang berskala lokal hingga berskala daerah bahkan hingga berskala nasional. Keberagaman konflik di Indonesia tidak hanya diwarnai oleh konflik horisontal namun juga diwarnai oleh konflik vertikal. Di Indonesia, beberapa contoh konflik tersebut diantaranya adalah konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada 1999-2004, konflik Ambon dan Poso pada 1999 yang memiliki motif yang sama yaitu konflik agama, kerusuhan Jakarta Lautan Api 1998 berbau rasial, kasus di Mesuji pada akhir 2011 yang merupakan konflik horisontal dan bahkan konflik ideologi seperti G30S/PKI.¹

¹ Sarwono, Sarlito Wirawan, 2012, *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan*

Salah satu potensi konflik terbesar berada di Provinsi Lampung, Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatra persisnya terletak di ujung selatan Pulau Sumatra berbatasan dengan Pulau Jawa. Provinsi Lampung sendiri merupakan pintu masuk Pulau Sumatera jalur darat dari Pulau Jawa.

Dilihat dari letak geografisnya, Provinsi Lampung yang berdekatan dengan Pulau Jawa memberikan akses yang cukup mudah bagi transmigran dari Pulau Jawa dan Pulau Bali untuk menetap di Provinsi Lampung. Menurut data sejarah, gelombang transmigrasi pertama terjadi pada November 1905 di era Pendudukan Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu transmigrasi pertama datang dari karesidenan Kedu.²

Transmigrasi di Provinsi Lampung tersebut menyebabkan

Psilogi, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, hlm. 1

²Okezone, Awal Mula Kedatangan Transmigran Jawa Ke Lampung, <http://m.okezone.com/read/2013/11/27/345/903438/awal-mula-kedatangan-transmigran-jawa-ke-lampung>, Di akses tanggal 12 oktober pukul 19.00 WIB

akulturasi budaya serta keberagaman yang cukup tinggi. Beberapa suku yang mendiami Provinsi diantaranya adalah Jawa 4.113.731 jiwa(61,88%); Lampung 792.312 jiwa (11,92%); Sunda, termasuk Banten 749.566 jiwa (11,27%); Semendo dan Palembang 36.292 jiwa (3,55%); Suku bangsa lain (Bengkulu, Batak, Bugis, Minang, dll) 754.989 jiwa(11,35%). Data diambil dari tahun 2000 sebab setelahnya BPS tak lagi mengelompokkan penduduk berdasarkan suku.³

Sebagian besar penduduk Provinsi Lampung beragama Islam (95,48%) dan beberapa agama lain seperti Kristiani (1,51%), Katolik (1,20%) Hindu (1,49%), Budha (0,32%) dan Konghucu (0,1%) . Warga keturunan Suku Bali mayoritas beragama Hindu sedangkan keturunan Suku Lampung sendiri mayoritas beragama Islam.⁴

Dengan adanya keberagaman suku dan agama tersebut maka di Provinsi Lampung memiliki potensi konflik yang tinggi. Konflik yang

terjadi Provinsi Lampung cukup beragam, mulai dari konflik sosial hingga konflik suku. Konflik di Desa Balinuraga yang terjadi pada bulan Oktober ini kedua belah pihak tidak bisa menemukan titik temu sehingga gesekan semakin memanas dan kerusuhan tidak bisa dielakan lagi.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan suatu konflik di dalam masyarakat serta upaya masyarakat untuk menghindari konflik dan upaya-upaya untuk menemukan solusi disetiap konflik yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya di Kabupaten Lampung Selatan, penanganan konflik oleh pemerintah sangat lamban dan cenderung memakan waktu yang lama. Beberapa konflik karena lambannya penanganan hingga mengganggu stabilitas nasional misalnya konflik Sampit dan Poso. Diharapkan, pemerintah tidak hanya menyelesaikan namun juga mampu mencegah sedini mungkin potensi-potensi konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat meminimalisir skala konflik.

³ BPS 2010

⁴ Sensus Penduduk 2010

Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah harus lebih terdepan dan responsif dalam menanggapi isu-isu yang beredar dimasyarakat sehingga pencegahan oleh pemerintah dalam hal ini aparatur negara dapat dilakukan sedini mungkin.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kealitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dan unit

pemerintahan di Desa Balinuraga, Desa Agom, pada bulan Januari hingga Februari 2016. Pada Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan dari Peran Pemerintah Lampung Selatan dalam upaya Resolusi Konflik di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Organisasi

Dalam hal ini yang termasuk kedalam organisasi adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kecamatan Way Panji, Pemerintah Desa Bali Nuraga, Kepala Dinas Pramong Praja Kabupaten Lampung Selatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Selatan.

b. Masyarakat

Masyarakat objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara juga disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden. Atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam hal ini pedoman wawancara tidak harus ada.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Desa Balinuraga dan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan. Fokus wawancara kepada kelompok di atas dengan pertimbangan bahwa mengetahui dengan mendalam terkait dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini beberapa narasumber diantaranya:

I. Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan SKPD yang mengurus masalah kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat di lingkup Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Bidang Politik dan Masyarakat Badan Kesbangpol Linmas Ismet Alwi.

II. Narasumber dari Masyarakat Desa Balinuraga adalah Pangir, dalam hal ini Pangir dipilih karena domisili di dekat pintu masuk desa sehingga kerusakan pada rumahnya parah.

III. Narasumber dari Masyarakat Desa Agom adalah Zulkarnain, dalam hal ini Zulkarnain adalah tokoh masyarakat Desa Agom

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Data sekunder ini diharapkan

sebagai penunjang dalam menganalisa permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Dokumentasi disini adalah Foto.

PEMBAHASAN

Menurut IDEA (2000:48-49), ada empat tahapan yang dilalui oleh konflik, yaitu; diskusi, polarisasi, segregasi, dan destruksi.

Dalam konflik di Desa Balinuraga, proses diskusi sendiri terjadi karena perbedaan pandangan dalam bidang ekonomi. Warga Agom menganggap warga Balinuraga yang merupakan penduduk minoritas imigran ini menjadi ancaman dalam memonopoli ekonomi yang ada dikawasan lampung selatan sehingga menghambat komunikasi dan sosialisasi masyarakat kedua belah desa. Tingginya perbedaan tingkat ekonomi membuta kecemburuan sosial yang sangat besar bagi masyarakat Desa Agom.

Dalam Fase Polarisasi adalah cukup terlihat, kedua belah masyarakat desa tersebut membentuk perkampungan yang hanya di huni

oleh satu suku saja atau homogen. Perkampungan Agom dihuni oleh suku lampung sedangkan dari Balinuraga dihuni oleh Masyarakat Suku Bali. Karena adanya pengelompokan seperti itu yang berlarut-larut maka komunikasi antara kedua kelompok masyarakatpun tidak terjalin sehingga darisini peluang terjadinya gesekan sangat besar.

Pada fase Segresi sendiri kedua belah desa hampir tidak lagi terjalin komunikasi dan cenderung membawa identitas wilayah dalam hal-hal pribadi sehingga mulai timbul pertahan dan penggambaran bagi para pemuda Desa Balinuraga dan Desa Agom. Pada masa ini peneliti mendapatkan informasi bahwa masing-masing desa memberikan ancaman apabila salah satu masyarakat desa lawan melintas di desanya sehingga dari hal tersebut komunikasi dan kontak sudah terputus dan keinginan untuk saling menyerang sudah sangat besar.

Fase Destruksi, fase ini ditandai dengan penyerangan masyarakat Desa Agom terhadap Perkampungan Desa Balinuraga pada tanggal 27

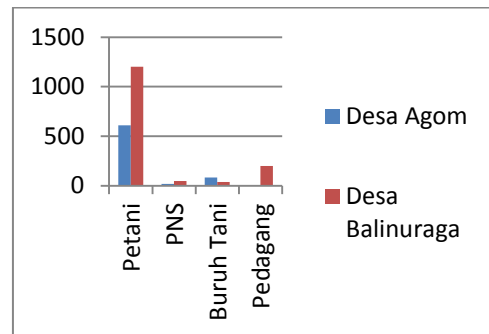
Oktober 2012. Dengan beberapa pematik yang ada seperti masalah pertikaian oleh tukang parkit dan para pemuda yang mengganggu pemudi desa agom maka terjadilah penyerangan .

Konflik di Desa Balinuraga merupakan konflik yang sangat serius untuk ditangani. Berdasarkan pengamatan peneliti, konflik Balinuraga dilandasi beberapa faktor internal diantaranya adalah:

1. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomomi yang terjadi di Desa Balinuraga cukup signifikan. Masyarakat pendatanang khususnya masyarakat Suku Bali banyak menguasai sektor-sektor ekonomi baik berupa sektor agraris maupun perdangangan.

Berdasarkan diagram berikut cukup jelas terlihat ketimpangan yang terjadi antara Suku Lampung Desa Agom dengan Suku Bali Desa Balinuraga.



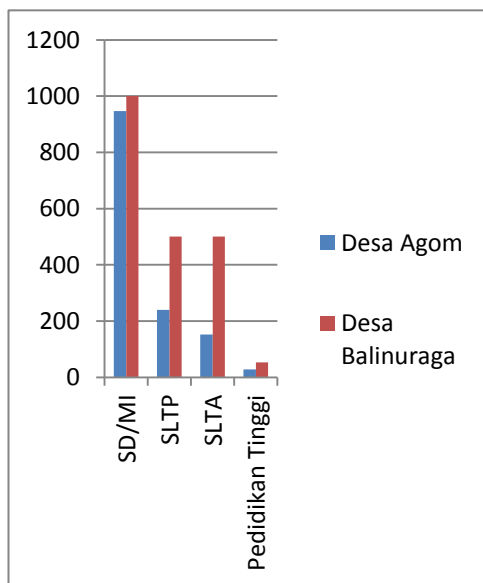
Gambar 3.01. Perbandingan Profesi

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa sektor pertanian dikuasai oleh penduduk Balinuraga. Penduduk yang merupakan pentani lebih banyak daripada yang berprofesi sehingga dapat disimpulkan bahwa petani pemilik lahan di Desa Balinuraga cukup banyak dibanding dengan penduduk Desa Agom .

Pada sektor perdagangan juga penduduk Desa Balinuragamendominasi sangat jauh dibanding dengan penduduk Desa Agom. Pedagang asal Desa Balinuraga sekitar 200 orang sedangkan pedagang Desa Agom hanya sekitar 5 orang. Dri jumlah tersebut sektor perdagangan antara kedua desa memiliki ketimpangan yang sangat jauh tidak heran jika penduduk Desa Balinuraga yang

minoritas menguasai sektor ekonomi pokok.

Dalam hal pendidikan, Desa Balinuraga jauh lebih unggul dibanding Desa Agom. Meskipun memiliki akses yang sama jauhnya terhadap pusat kota namun penduduk Balinuraga sangat memperhatikan pendidikan bagi generasi mudanya berikut ini adalah diagram perbandingan tingkat pendidikan antara kedua desa:



Gambar 3.02 Perbandingan Tingkat Pendidikan

Dari data diatas dapat menunjukkan bahwa Desa Balinuraga memiliki lebih banyak penduduk terdidik dibandingkan Desa Agom namun tidak terpaut terlalu jauh.

2. Faktor Suku dan Agama

Perbedaan yang sangat mencolok antara masyarakat Desa Balinuraga dan Desa Agom adalah Suku dan Agama. Penduduk Desa Agom merupakan keturunan Suku Lampung yang mayoritas beragama Islam sedangkan penduduk Desa Balinuraga merupakan penduduk imigran dari Provinsi Bali yang bersuku Bali dan mayoritas beragama Hindu.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu penyebab konflik dalam hal ini perbedaan digunakan sebagai acuan dalam polarisasi antara kedua belah pihak. Sehingga kawasan pemukimanpun bergerombol antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Desa Balinuraga yang mayoritas beragama Hindu cenderung menjaga jarak dengan kelompok masyarakat yang lainnya terbukti dari lokasi pemukiman Desa Balinuraga yang hanya dihuni oleh Suku Balinuraga dan cenderung eksklusif.

D. Pemicu Konflik

1. Konflik Individu

Berdasarkan Nota Dinas Badan Kesbangpolinmas awalnya

sekelompok pemuda desa bali nuraga yang sedang duduk-duduk di persimpangan jalan desa waringin harjo menggodanya 2 (dua) gadis remaja yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan berasal dari desa agom kecamatan kalianda atas nama nurdiana dewi (17 tahun) dan emilia (17 tahun). Akibat godaan tersebut kedua gadis terjatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan luka-luka.

Namun berdasarkan penuturan Narasumber Pangir, kerusuhan dipicu oleh serempetan kendaraan antara anak muda, menurutnya pemuda Desa Balinuraga terserempet oleh Pemuda Desa Agom, pemuda balinuraga menolong pemuda Desa Agom yang jatuh mengendarai sepeda motor namun melaporkan kepada orangtuanya. Pemuda yang melaporkan kepada orangtuanya berbeda dengan kenyataan yang terjadi, pemuda desa balinuraga menuturkan jika yang terjadi adalah pelecehan seksual sehingga memicu kemarahan warga Desa Agom yang menuntut pertanggungjawaban dan permintaan maaf.

Seperti keterangan dari narasumber Pangir:

“Awalnya itukan anak-anak muda, sepeda sama motor serempetan. Anak sini bawa sepeda, anak sana bawa motor nah jadilah serempetan, nah Cuma seperti itu aja sebenarnya.”

Berdasarkan kesaksian dari Narasumber Pangir, diketahui bahwa permasalahan awal ditimbulkan oleh masalah sederhana antara para pemuda, namun terjadi bias sehingga yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang disampaikan pemuda kepada orangtuanya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dan menimbulkan kemarahan warga. Senada dengan hal itu Narasumber Zulkarnain dari Desa Agom juga mengemukakan yang sama:

“Itu awalnya masalah anak muda kita diganggu anak-anak dari Balinuraga, terus darisini (Warga Desa Agom) tidak terima pemuda kita diganggu-ganggu sama mereka, jadi ya itu sebagian warga sini kesana buat minta klarifikasi tapi malah semua pada emosi”

Konflik yang terjadi pada bulan oktober 2012 bukan konflik pertama antara kedua pihak, sebelumnya pada pada bulan januari diketahui terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh permasalahan parkir. Pada tanggal 22 Januari 2012 seorang tukang parkir meminta uang parkir kepada warga Kotadalam yang notabene adalah Suku Lampung namun warga Kotadalam tersebut menolak memberikan uang parkir sehingga membuat tukang parkir yang berasal dari suku Bali marah. Keesokan harinya seorang warga dicegat di Desa Napal yang sebagian besar penduduknya merupakan Suku Bali. Hingga akhirnya terjadi penyerangan terhadap warga Bali yang berujung pengerusakan rumah.

Dalam kerusuhan pada bulan Januari kedua belah pihak sudah berdamai dengan menarik diri, namun sentimen dan rasa dendam dikedua pihak yang dalam hal ini berbeda suku dan agama masih ada. Sehingga peristiwa pada kecelakaan gadis Lampung sebagai puncak memanasnya kembali hubungan kedua desa yang berbeda suku ini.

E. Peran Badan Kesbangpol

Pemerintah Lampung Selatan dalam hal ini di wakili oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki wewenang menjaga dinamika politik dan kesatuan kebangsaan diwilayah Kabupaten Lampung Selatan dan juga memiliki wewenang Perlindungan Masyarakat dengan bersinergi bersama Kepolisian serta Tentara Nasional Indonesia. Untuk pendanaan sendiri dari Kesbangpol mengikuti birokrasi yang ada, yaitu diajukan kepada BAPPEDA untuk disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan tersebut diantaranya untuk pembinaan Forum-Forum yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya adalah FKUB atau forum kerukunan umat beragama. Selain itu juga ada FKDM atau Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Keduanya dibina oleh Badan Kesbangpol Lampung Selatan. F.

Rekonstruksi Pasca Konflik

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Balinuraga, untuk saat ini situasi normal dan sudah tidak terlihat lagi adanya sisa sisa pasca konflik, pembangunan pun sudah kembali berjalan dan roda ekonomi

sudah kembali bergerak. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban, baik berupa bantuan tunai maupun bantuan material bangunan dan lain sebagainya. Pemerintah melalui Kemenpera dan Kemensos menyalurkan bantuan serta rehabilitasi pasca konflik.

G. Penyelesaian

Konflik di Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan dengan asas kekeluargaan. Berdasarkan pada perjanjian yang dibuat tanggal 4 November 2012 pada butir ke 3 menyatakan bahwa apabila terjadi permasalahan pribadi baik yang telah berlalu maupun yang akan datang untuk semua masyarakat yang mendiami Kabupaten Lampung Selatan maka diselesaikan dengan asas kekeluargaan namun apabila tidak kunjung ditemukan maka perkara diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Dalam kasus kerusuhan di Desa Balinuraga, pada poin kedelapan menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut dilarang melakukan tuntutan

hukum apapun akibat jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka. Dengan dibuatnya surat pernyataan oleh keluarga korban dengan di saksikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga berlaku bagi aparat Kepolisian.

Dengan adanya 10 (sepuluh) butir perjanjian damai diatas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertika maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan segala permasalahan kedepannya diharapkan agar menyelesaikan masalah menggunakan asas kekeluargaan.

KESIMPULAN

DAN SARAN

1. Faktor Penyebab Konflik di Desa Balinuraga:

1.1. Faktor Kesenjangan Sosial

Selain itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti faktor kesenjangan sosial juga turut mewarnai konflik tersebut. Dilihat dari kawasan pemukiman warga, peneliti melihat bahwa kawasan kampung Balinuraga cenderung lebih maju dibanding kawasan Suku Agom, hal itu dapat dilihat dari bangunan rumah-rumah warga Desa

Balinuraga mayoritas cenderung lebih mewah dibanding perumahan suku Agom. Selain itu juga, warga desa Balinuraga terkenal memiliki lahan persawahan yang lebih luas yang lokasinya di Daerah Bali Seragi. Sawah tersebut berasal dari pembagian jatah pada masa transmigrasi maupun hasil dari jual beli dengan penduduk asli.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan pada kasus konflik di Desa Balinuraga bulan Oktober 2012, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan sesuai koridor-koridor hukum yang berlaku yaitu undang-undang no 07 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Badan Kesbangpol Linmas bergerak sebagai koordinator dalam penanganan konflik di Desa Balinuraga. Mengkoordinir Pengaman dari TNI dan Polri serta bantuan dari Palang Merah Indonesia dan Dinas Sosial.

Didalam proses perdamaian seluruh kendali di pegang oleh Sekertariat Daerah Provinsi Lampung dibawah

pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Konflik yang berdampak bagi kestabilan politik Provinsi Lampung ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Republik Indonesia karena dikhawatirkan menjalar lebih jauh kepada faktor Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau SARA. Sehingga pemerintah pusat dengan serius mengantisipasi dengan sungguh-sungguh agar tidak seperti konflik di Sampit maupun di Poso.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan kesaksian dari Narasumber, hasil mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang membuahkan 10 butir pokok perjanjian perdamaian hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat-masyarakat yang bertikai. Hingga hari ini tidak ada lagi gesekan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Semua gesekan yang terjadi dikawasan Desa Balinuraga diselesaikan dengan mengutamakan cara-cara kekeluargaan. Kini kedua desa yang bertikai sudah kembali beraktivitas dan bersosialisasi seperti biasa, tidak dijumpai lagi tanda-tanda dendam

maupun sisa-sisa konflik yang telah berlalu. Kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjaga keamanan dan perdamaian bersama-sama.

3. Saran

Saran untuk Badan Kesbangpol Linmas adalah harus terus berupaya menjaga stabilitas sosial dimasyarakat di kawasan Lampung Selatan. Badan Kesbangpol diharapkan terus memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada seluruh masyarakat Lampung Selatan disetiap lapisan masyarakat. Seperti pengamatan peneliti, sosialisasi wawasan kebangsaan baru digalakan setelah pecahnya kerusuhan sebelumnya tidak pernah ada, seharusnya Dinas Kesbangpol lebih antisipatif dari jauh-jauh hari.

Koordinasi Badan Kesbangpol dengan stakeholder terkait harus diperkuat lagi sebelum konflik terjadi. Laporan-laporan yang diterima seharusnya diteruskan lebih cepat kepada Bupati maupun aparat keamanan yang ada sehingga dapat melakukan pencegahan lebih dini untuk meminimalisir dampak dari konflik. Seperti yang kita ketahui,

pada konflik di Desa Balinuraga lalu, jumlah aparat yang berjaga kalah jauh dengan massa yang mengamuk sehingga susah untuk melakukan pengamanan. Aparat Keamanan datang lebih banyak setelah jatuhnya korban jiwa, seharusnya dari pengalaman sebelumnya, Badan Kesbangpol dan Aparat Keamanan dapat memprediksi jumlah masa dan menurunkan petugas pengamanan yang ideal sehingga massa yang mengamuk dapat tertangani dengan baik dan tanpa menimbulkan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anstey, Mark, DKK.2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar*. AMEPRO
- Hamdi, Asep Saepul & Bahrudin, E., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Aplikasi Pendidikan*, Yogyakarta: deepublish.
- Imran, Amrin, 2001, *Radin Inten II: pahlawan nasional dari Lampung*, Jakarta: Sentra Kreasi.
- Keraf, Gorys. 1984. *"Komposisi"*. Flores: Penerbit Nusa Indah.

- Maryati & Suryawati, 2007, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga.
- Miles, MB dan AM Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SetiaSAGE. Beverly Hills.
- Nasution, 2003, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pruitt, Dean G. & Rubin, Jeffrey Z., 1986, *Teori Konflik Sosial*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusdiana H. A., 2015, *Manajemen Konflik*, Bandung: Pustaka Sarwono,
- Sarlito Wirawan, 2012, *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi; Pemerintahan Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: AFABETA.
- Vardiansyah, Dani, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks.
- Psilogi*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, hlm. 1
- ¹Okezone, Awal Mula Kedatangan Transmigran Jawa Ke Lampung, <http://m.okezone.com/read/2013/11/27/345/903438/awal-mula-kedatangan-transmigran-jawa-ke-lampung>, Di akses tanggal 12 oktober pukul 19.00 WIB